



PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH SEBAGAI PROSES AKUNTABILITAS PUBLIK

(Studi Kasus Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten
Sidenreng Rappang)

*Application Of Regional Financial Information Systems As A Public Accountability Process
(Case Study Atthe Local Government Finance Office (Lgfo) Ofsidenreng Rappang Regency)*

Fatimah¹⁾ , Indrayani²⁾

E-mail : fatimahumpar11@gmail.com¹⁾; Indrayanib2512@gmail.com²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131

Abstract

This study aims to analyze and find out the implementation of the Regional Financial Information System as a Public Accountability Process in the Local Government Finance Office (LGFO) in Sidenreng Rappang Regency. The method is used of this research is descriptive qualitative as a gradual cyclical process that begins with the identification of the problem or issue to be studied, after observing and knowing the population that is the subject of the study, then sampling is carried out using the Proportionate Stratified Random Sampling method in determining informants who will be interviewed further to dig deeper about the implementation of Regional Financial Information Systems at the Local Government Finance Office of Sidenreng Rappang Regency. The results showed that the implementation of honesty accountability in terms of being open to the public, there is honesty and not violating the rules. Process accountability, have fulfilled the adequacy of accounting information systems, management information systems and administrative procedures. Program accountability, is very helpful in presenting financial reports appropriately and integration between official in the Sidendeng Rappang Regency so that they can create quality programs that support the strategy to achieve the vision, mission and organizational goals. Policy accountability, has been made and in making decisions a head of official already has a sense of responsibility and concern in carrying out policies in the Local Government Finance Office of Sidenreng Rappang Regency.

Keywords: Regional Financial Information System; Budget Revenue; Regional Expenditures; Public Accountability

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Sebagai Proses Akuntabilitas Publik Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian ini adalah deksriptif kualitatif yaitu penelitian sebagai suatu proses bertahap bersiklus yang dimulai dengan identifikasi masalah atau isu yang akan diteliti, setelah mengamati dan mengetahui populasi yang menjadi subjek penelitian, selanjutnya dilakukan *sampling* dengan menggunakan metode *Proportionate Stratified Random Sampling* (Sampel Acak Berstrata secara Proporsional) dalam menentukan informan yang akan diwawancarai lebih lanjut untuk menggali lebih dalam mengenai Penerapan Sistem Informasi Keuangan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Akuntabilitas kejujuran dalam hal terbuka pada masyarakat, ada kejujuran dan tidak menyalahi aturan. Akuntabilitas proposes sudah memenuhi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas program, sangat membantu dalam penyajian laporan keuangan secara tepat dan integrasi antara Dinas dilingkup kabupaten Sidendeng Rappang sehingga dapat menciptakan program yang bermutu yang mendukung strategi pencapaian visi misi dan tujuan organisasi. Akuntabilitas kebijakan, telah dibuat dan dalam pengambilan keputusan seorang kepala instansi sudah memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian dalam menjalankan kebijakan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang belum sesuai.

Kata Kunci: Sistem Informasi Keuangan Daerah; Anggaran Pendapatan; Belanja Daerah; Akuntabilitas Publik

PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk membentuk pengelolaan data yang lebih cepat, efektif dan efisien. Oleh karena itu, dikeluarkan peraturan untuk dapat dilakukan pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) untuk menyajikan laporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang cepat, akurat dan akuntabel (Arfianti & Kawedar, 2011).

Beberapa perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah penting dilakukan terutama aspek anggaran, akuntansi dan pemeriksaan yang memerlukan prioritas utama agar pengelolaan keuangan yang baik dapat dilakukan (Rusyantini & Budiman, 2012). Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik (Nugroho, 2014) dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi (Azwardi, 2014) dan dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya kepada masyarakat secara luas (Martha, 2014).

Studi literatur ini mengindikasikan bahwa dalam konteks, keragaman obyek penelitian dapat dibedakan kedalam konteks Akuntabilitas publik. Dalam konteks Dimensi Akuntabilitas Publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik yaitu Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas Program, Akuntabilitas Kebijakan, Akuntabilitas Finansial (Hopwood dan Tomkins, 1984; Ellwood 1993), sedangkan menurut J.D Stewart dalam Andrianto (2007) mengidentifikasi bahwa akuntabilitas publik terdiri dari lima jenis, yaitu *Policy Accountability, Program Accountability, Performance Accountability, Process Accountability, Probity and Legality Accountability* (Safitri & Zeyn, 2017; Merialsa, 2017; Broadbent dkk., 1996).

Agar akuntabilitas sektor publik dapat tercapai diperlukan sistem akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang adil, efektif dan efisien. Perkembangan sebuah sistem yang dianggap untuk tepat diimplementasikan di daerah menghasilkan suatu Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi. Dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) diharapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai (Halim, 2007). Adapun manfaat penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan (2005:11) adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keadaan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan.

Sejalan dengan RPJM Tahun 2010-2014, berdasarkan Renstra Tahun 2010-2014, Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah yang bertujuan untuk mendukung kinerja "*Meningkatnya Tingkat Opini BPK terhadap LKPD*" sebagai indikator capaian. Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalkan manajemen daerah, saat ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan aplikasi komputer berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Keuangan, khususnya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 telah melakukan bimbingan atau sosialisasi penerapan SIMDA. Ini dilakukan untuk mencapai target WTP dalam *good governance*, Implementasi SIMDA keuangan pada Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan penerapan awal untuk menyusun anggaran tahun 2013. Maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerapan sistem informasi keuangan daerah sebagai proses akuntabilitas publik yang dilakukan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap. Informan sebagai subjek penelitian ini adalah pegawai Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditugaskan melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Desain penelitian yang dilakukan menggunakan teknik pengamatan langsung pada subjek penelitian dengan menggunakan metode *Proportionate Stratified Random Sampling* (Sampel Acak Berstrata secara Proporsional). Informan yang diwawancarai lebih lanjut bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai Penerapan Sistem Informasi Keuangan Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap.

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer, dimana data primer diperoleh langsung dari informan. Sumber data dapat berupa *Paper* (Dokumen) yang merupakan data dokumen terkait terutama yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Data *Person* (Individu) merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara informan. Data *Place* (Tempat) merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dilokasi penelitian yang berupa kejadian atau aktivitas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa instrumen Wawancara (*interview*) dan Dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan deksriptif kualitatif, dimana penelitian dimulai dengan identifikasi masalah. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi khusus. Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian membangun pola-pola umum.

Penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan luas, kemudian meruncing dan mendetail. Informasi yang disampaikan partisipan kemudian dikumpulkan. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdalam. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, display data dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pembahasan ini mengacu pada hasil rangkuman wawancara. Untuk mengetahui akuntabilitas tersebut akan digunakan empat indikator pengukuran akuntabilitas menurut Ellwod 1993 (dalam Mardiasmo, 2002) yaitu Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas Kebijakan. Dari keempat indikator ini akan dibahas secara berurutan.

Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas hukum dan akuntabilitas kejujuran merupakan akuntabilitas lembaga publik agar dapat berperilaku jujur untuk bekerja serta taat akan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini perlu transparansi dalam penggunaan dana publik dengan baik dan benar. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum serta peraturan lainnya yang ditentukan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan penting terhadap upaya menghindari penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Transparansi yang diikuti akuntabilitas menjamin luaran dari pelaksanaan kebijakan publik (Martha, 2014).

Akuntabilitas hukum menuntut penegak hukum sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat dan tidak terjadi kecurangan. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum berhubungan erat dengan efektifitas pencapaian hasil dan efisien pengelolaan atau penggunaan sumber pembangunan. Dalam proses penyelenggaraan yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, meliputi penyajian informasi anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dalam hal kejujuran dan tidak menyalahi aturan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa,

“Penyelenggaraan SIKD pada BPKD sangat membantu dalam penyajian informasi anggaran dan lain-lain. Karena sudah saling terintegrasi satusama lain dengan semua OPD yang ada”.

Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa penyelenggaraan SIKD membantu kepala daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah, dimana telah diterapkan oleh pada BPKD Kabupaten Sidrap karena dalam penyusunan anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah, sistem informasi keuangan daerah memudahkan pengelolaan keuangan dan sangat membantu informasi untuk kepala daerah. Manfaat penggunaan sistem informasi adalah kecepatan proses transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan hitungan serta proses yang lebih rendah dan kemampuan multiproses (Arfianti & Kawedar, 2011).

Hasil wawancara yang dilakukan pada pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa,

“Sayangnya belum disajikan secara terbuka akibat belum tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung”

Penyelenggaraan SIKD pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menyajikan Informasi Keuangan Daerah belum secara terbuka kepada masyarakat. Untuk mengetahui Informasi Keuangan Daerah melalui aplikasi sistem informasi keuangan daerah yang hanya diakses oleh pihak-pihak tertentu yang mengetahui password aplikasi tersebut. Setiap satuan kerja perangkat daerah memiliki password masing-masing yang berbeda untuk aplikasi SIKD tersebut yang hanya diketahui oleh bagian akuntansi dan pelaporan.

Masyarakat hanya dapat mengetahui informasi mengenai rencana umum pengadaan yang telah dipublikasikan, selain itu aplikasi SIKD hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu karena adanya *log in* sebelum membuka aplikasi tersebut. Ini pula yang merupakan keterbatasan dalam penelitian ini, penulis tidak dapat menjelaskan lebih rinci mengenai aplikasi pengelolaan keuangan Kantor BPKD karena adanya password sebelum membuka aplikasi tersebut sehingga tidak dapat diakses.

Implementasi Akuntabilitas kejujuran dalam hal terbuka pada masyarakat, pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang belum sesuai, karena informasi keuangan daerah belum terbuka kepada masyarakat, masih terbatasnya informasi yang dapat disampaikan dan adanya beberapa informasi yang tidak untuk diketahui oleh masyarakat atau ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dipublikasikan sepenuhnya.

Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses sangat berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam menjalankan tugas publik. Akuntabilitas proses dimanifestasi sebagai pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif serta murah (Septa, 2018). Akuntabilitas proses berkaitan dengan metode dan prosedur operasi dari suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Akuntabilitas proses menekankan bahwa beberapa tujuan mungkin tidak dapat diukur dan diganti secara langsung, tetapi menyajikan bagaimana kegiatan dapat diarahkan untuk mencapai tujuan (Saldrak dkk., 2018). Akuntabilitas adalah proses internal yang dimanifestasikan dalam norma-norma untuk menjalankan organisasi (Julia, 2012; Ambarsari & Setiawati, 2015).

Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidrap pada penyajian informasi keuangan daerah oleh Kabupaten Sidrap telah melalui situs resmi pemerintah yang telah diterapkan. Sistem informasi keuangan daerah untuk mendukung SIKD secara nasional karena secara priodik dan akhir tahun dapat mengirim data realisasi anggaran ke kementerian keuangan maupun ke kementerian dalam negeri, provinsi dan instansi terkait lainnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa,

“Penyajian informasi keuangan daerah Kabupaten Sidrap yang digunakan dalam situs resmi untuk SIKD bukan merupakan situs resmi Provinsi tetapi sistem resmi secara nasional, karena secara periodik dan akhir tahun dapat mengirim data realisasi anggaran ke kementerian keuangan maupun ke kementerian dalam negeri, provinsi, dan instansi terkait lainnya”

Akuntabilitas proses yang dimaksudkan disini adalah Penyajian informasi keuangan dan implementasi pengelolaan SIKD. Akuntabilitas prosedural adalah pertanggungjawaban terkait pentingnya prosedur dilaksanakan (Fajri, 2015). Akuntabilitas prosedural juga merupakan pertanggungjawaban mengenai penetapan serta pelaksanaan akan kebijakan dengan mempertimbangkan masalah moral, etika, kepastian hukum dan ketaatan (Gohora dkk., 2018).

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa,

“Cukup membantu, tapi belum cukup maksimal dalam merumuskan kebijakan keuangan masih perlu dioptimalkan di segala lini”

Dilihat dari penjelasan di atas dan rangkuman wawancara, maka dalam hal ini akuntabilitas proses peneliti mencoba mengkombinasikan dengan sistem informasi keuangan daerah yang ada pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa sistem informasi keuangan daerah yang ada di dinas ini dalam Penyajian informasi keuangan dan implementasi pengelolaan SIKD belum sesuai dengan harapan yang bisa menunjang berkembangnya dinas tersebut, karena sistem informasi keuangan daerah belum sepenuhnya membantu kepala daerah untuk merumuskan kebijakan keuangan serta untuk pengelolaan keuangan pada program kerja yang akan dan telah dilaksanakan dan administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di dinas tersebut masih belum optimal.

Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan tercapai atau tidak, serta apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program dengan hasil optimal namun menggunakan biaya yang minimal (Putra, 2013). Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program (Martha, 2014). Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian visi dan misi, dan tujuan organisasi (Situmorang, 2013).

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran, tujuan yang telah ditetapkan.

Kegiatan sistem informasi keuangan daerah juga merupakan salah satu bagian dari program yaitu, suatu tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh OPD dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan laporan keuangan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa,

“Adanya sistem Informasi Keuangan Daerah telah membantu dalam penyajian laporan keuangan, sangat membantu penyajian laporan keuangan secara cepat dan saling terintegrasi dengan OPD-OPD lingkup dinas Sidenreng Rappang”

Dengan diterapkannya sistem informasi keuangan daerah mempermudah pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) dalam penyajian informasi penggunaan anggarannya. Laporan ini mengenai penerimaan dan pengeluaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat diliput setiap harinya melalui aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dilihat oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan bahwa,

“Dengan dukungan sistem yang ada, penyajian laporan dapat tepat waktu karena SIKD didukung dan dibuat oleh BPK sebagai pendor sistem informasi SIKD”

Kepala Daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menerapkan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara evaluasi terhadap kinerja keuangan dan dapat mengetahui realisasi keuangan baik dari segi pendapatan dan belanja daerah.

Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberikan masukan atas kebijakan kepada pemerintah (Sa'adah, 2015). Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut (Sa'adah, 2015; Masyhur dkk., 2017; Purba, 2017).

Namun, adanya konsep Sistem Informasi Keuangan Daerah kewajiban kepada pemerintah untuk melakukan pertanggungjawaban, keterbukaan informasi dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Selain itu UU Keterbukaan Informasi Publik juga mewajibkan pemerintah untuk melakukan transparansi informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Hal tersebut melatarbelakangi adanya akuntabilitas dan transparansi anggaran melalui elektronik di pemerintahan kabupaten Sidenreng Rappang.

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu (Wahyuddin, 2017; Rande, 2017). Kebijakan juga merupakan analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermutu kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Asal mula analisis terjadinya suatu kebijakan disebabkan oleh banyaknya kebijakan yang tidak memuaskan.

Menurut peneliti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah pengelolaan keuangan belum terlalu baik, contohnya dalam pembuatan laporan administrasinya masih terdapat kekeliruan dalam penulisan pengolahan data. Oleh karena itu dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah khususnya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada kebijakan yang telah dibuat dan dalam pengambilan keputusan seorang kepala instansi sudah memiliki rasa tanggungjawab dan kepedulian agar dalam menjalankan kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

SIMPULAN

Implementasi Akuntabilitas kejujuran dalam hal terbuka pada masyarakat, pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang belum sesuai, karena informasi keuangan daerah belum terbuka kepada masyarakat, masih terbatasnya informasi yang dapat disampaikan dan adanya beberapa informasi yang tidak untuk diketahui oleh masyarakat atau ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dipublikasikan sepenuhnya. Sistem informasi keuangan daerah di dinas dalam Penyajian informasi keuangan dan implementasi pengelolaan SIKD belum sesuai dengan harapan yang bisa menunjang berkembangnya dinas tersebut, karena sistem informasi keuangan daerah belum sepenuhnya membantu kepala daerah untuk merumuskan kebijakan keuangan serta untuk pengelolaan keuangan pada program kerja yang akan dan telah dilaksanakan dan administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di dinas tersebut masih belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarsari, F. N., & Setiawati, E. (2015). *Analisis Kinerja PLN Berdasarkan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan Akuntabilitas Publik (Studi Empiris Pada PT. PLN (Persero) Area Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Andrianto, Nico. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arfianti, D., & Kawedar, W. (2011). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Batang)* (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Azwardi, A. (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 29-41.
- Broadbent, J., Dietrich, M., & Laughlin, R. (1996). The development of principal-agent, contracting and accountability relationships in the public sector: conceptual and cultural problems. *Critical perspectives on accounting*, 7(3), 259-284.
- Ellwood, Sheilla. 1993. Parish Town and Councils: Financial Accountability and Management. *Local Government Studies*, Vol 19, pp 368-386.
- Fajri, R. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(7), 1099-1104.
- Gohora, J., Lengkong, F. D., & Plangiten, N. (2018). Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam pembangunan infrastruktur daerah kabupaten halmahera utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(49).
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Salemba Empat: Jakarta.
- Julia, D. N. (2012). *Analisis Kinerja Rumah Sakit Swasta Berdasarkan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi Dan Akuntabilitas Publik (Survei pada Rumah Sakit Kasih Ibu di Surakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martha, W. (2014). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Di Kota Bandung (Survey Diinstansi Pemerintah Kota Bandung)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Martha, W. (2014). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Di Kota Bandung (Survey Diinstansi Pemerintah Kota Bandung)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Masyhur, M., Hardi, H., & Silfi, A. (2017). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Pengendalian Internal terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah Kota Dumai. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1179-1192.
- Merialsal, A. I. (2017). *Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Inspektorat dan BPKAD Kota Bandung)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
- Nugroho, F. A. (2014). *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi*

Kasus Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) Se-Ekskarisidenan Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

- Purba, C. B. (2017). Opini dan Status Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan pada Pemerintah Daerah di Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 383-407.
- Putra, D. (2013). Pengaruh akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial Satuan kerja perangkat daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Rande, S. (2017). Evaluasi Program Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Batu Cermin RT 06 Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara. *Jurnal Paradigma (JP)*, 6(1), 10-21.
- Rusyantini, A., & Budiman (2012). Analisis sistem akuntansi syariah pada koperasi jasa keuangan pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan Srengseng Sawah (KJK PEMKSS) Jakarta Selatan periode 2011.
- Sa'adah, B. (2015). Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government (Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar). *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 1-10.
- Safitri, F., & Zeyn, E. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Inspektorat Provinsi Jawa Barat)* (Doctoral dissertation, Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas Bandung).
- Saldrak, P., Ogotan, M., & Londa, V. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Di Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(52).
- Septa, P. (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
- Situmorang, M. (2013). Membangun Akuntabilitas Organisasi Bantuan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 107-119.
- Wahyuddin, M. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2010-2015 Bidang Pendidikan Dan Bidang Kesehatan. *Jurnal Paradigma (JP)*, 5(1), 1-10.